



Atbah Warning Dana Desa

■ Alokasi Sambas Rp 243 Miliar

SAMBAS, TRIBUN - Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili, memberikan warning kepada seluruh kepala desa di Sambas dalam hal penggunaan dana desa. "Saya berharap karena dana desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi perhatian KPK dan BPK tolong sangat-sangat hati-hati dan serius. Melaksanakan dan mengelolanya sesuai perundangan dan aturan ada harus itu," kata Atbah kepada *Tribun*, Kamis (16/2).

Dirinya meminta kepada seluruh camat untuk rutin mengadakan pertemuan dengan pihak desa guna mengontrol dan monitoring. Baik penggunaan maupun laporan jelas dana desa. "Kita juga telah meminta semua camat, tolong kecamatan memfasilitasi pertemuan dengan desa untuk memperkuat, supaya berkaitan dengan pertanggung jawabannya, laporan maupun penggunaannya jelas dan *clear*," tegas Atbah.



...karena dana desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi perhatian KPK dan BPK, tolong sangat-sangat hati-hati dan serius.

Atbah Romin Suhaili
Bupati Sambas

Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten (Dinsos PMD) Sambas, Apriyandi, mengatakan dana desa sambas 2017 mencapai Rp 243 miliar.

Angka ini, didapat dari-

ADD Sambas Rp 90,3 miliar dan dana desa program pemerintah pusat dari APNBN sebesar Rp 153 miliar.

"Jumlah tersebut meningkat dari tahun tahun sebelumnya. Di mana pada 2016, total dana yang masuk dan dikelola oleh desa Rp 209 miliar. ADD Kabupaten sebesar Rp 91 miliar dan dana desa dari pusat Rp 118 miliar," ujar Apriyandi.

Ia menjelaskan dalam penyalurannya, dana desa tidak merata. Seperti ADD sebesar 10 persen proporsional yang diberikan sesuai kondisi desa, sedangkan 90 persen lainnya diberikan merata dari total Rp 90,3 miliar tersebut.

"Untuk pembagiannya, ADD beda-beda. Ada indikasinya. Kita mulai dari pendidikan wilayah, kemudian tingkat keisolasian letak geografis, tingkat kesehatan masyarakat, dan kesejahteraannya. Proporsional 10 persen dan sisanya 90 persen merata dari total ADD," paparnya.

Menurutnya, dana desa program pemerintah pusat diberikan sesuai ketentuan dari pemerintah pusat. Kepala Desa Tri Gadu, Kecamatan Galing, Sugianto, mengatakan dirinya selaku kepala desa tetap akan mengikuti aturan dari pemerintah pusat dan kabupaten terkait penggunaan dana desa. "Supaya tidak ada penyelewengan, karena kita takut juga," ujarnya.

Ia mengatakan untuk ADD di desanya alokasi dana mencapai Rp 600 juta lebih. Sedangkan dana desa Rp 783 juta pada 2017. Dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan Bumdes dan juga infrastruktur desa. "Karena desa kami merupakan desa tertinggal," tegasnya. **(mon)**